



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
INSPEKTORAT DAERAH

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIWULAN I
TAHUN 2025

"Nasudhaira Kutumbakam"



ປິຍົມິສຸງ ງາລາວາ ງາລາສາລີ

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ຕຸງຄຸນາກຸສຸນາວາລາ ທາລາກຸ

INSPEKTORAT DAERAH

ຄະນະ ປິຍົມິສຸງ ງາລາວາ ທາລາສາລີ ງາລາກຸລາລາລີ (໑໐ ທຸລາກຸລາ) ທາລາກຸລາລາລີ

Jalan Menuh Nomor 8 Denpasar, Telepon (0361) 234876

Laman: inspektorat.denpasarkota.go.id, Pos-el: inspektorat@denpasarkota.go.id

LAPORAN TRIWULAN I PENGELOLAAN RISIKO INSPEKTORAT DAERAH KOTA DENPASAR

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai upaya peningkatan dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab menuju terwujudnya Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik (*good governance*) diperlukan suatu media pertanggung jawaban dalam bentuk Laporan Kinerja yang mana Pengendalian Intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hal ini dilatar belakangi dengan telah bergesernya karakter pengendalian intern dari *hard control* menuju *soft control*. Artinya pengendalian tidak lagi efektif jika dikemas dalam kegiatan yang bersifat represif. Pengendalian harus dari masing-masing pribadi aparatur pemerintah yang dikendalikan oleh sebuah sistem yang mapan, namun tetap dinamis. Dengan kata lain, pelaksanaan pengendalian intern dengan sistem yaitu pengendalian bukan dari orang, akan tetapi oleh sistem atau metode-metode yang telah dibuat dan ditetapkan. Ruang lingkup pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 meliputi seluruh kegiatan pemerintahan. Komponen pengendalian intern terdiri dari unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Manajemen Risiko merupakan salah satu tahapan dalam Pengendalian Intern. Penerapan Manajemen Risiko berpijak

pada konsep Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang telah dilaksanakan dan terintegrasi dengan strategi manajemen sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Dalam konsep Pengendalian Intern Pemerintah, SPIP berada pada level *first line defense* sedangkan Manajemen Risiko berada pada level *second line defense* yang mengelola risiko lintas intern OPD, serta Inspektorat selaku aparat pengawas intern bertindak sebagai *third line defense*. Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan berkesinambungan meliputi identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan pelaporan risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya. Faktor yang menentukan keberhasilan penerapan Manajemen Risiko meliputi:

1. Komitmen pimpinan terhadap kebijakan, proses, dan rencana tindakan;
2. Pihak yang ditetapkan untuk secara langsung bertanggung jawab guna mengoordinasikan proses Manajemen Risiko;
3. Kesadaran setiap pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Kementerian terhadap prinsip-prinsip Manajemen Risiko untuk menciptakan *culture/budaya* yang tepat dan memahami manfaat yang dapat diperoleh dari Manajemen Risiko yang efektif;
4. Kebijakan Manajemen Risiko yang merinci peranan dan tanggung jawab dari unsur pimpinan dan staf pada setiap unit kerja;
5. Metodologi Manajemen Risiko yang menyeluruh;
6. Pelatihan tentang Manajemen Risiko untuk tujuan kepedulian risiko bagi seluruh pejabat dan/atau pegawai; dan
7. Pemantauan yang terus menerus mengenai aktivitas pengendalian risiko.

B. DASAR HUKUM

Dasar penyusunan Manajemen Risiko adalah :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2026;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko Pada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
10. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56);
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Unit Kepatuhan untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.

D. RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO

Kegiatan pemantauan efektivitas manajemen risiko di lingkungan UPR Inspektorat Daerah Kota Denpasar dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

BAB II

RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu risiko yang telah diidentifikasi dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, suatu risiko dapat ditentukan tingkat dan status risikonya sehingga dapat dihasilkan suatu informasi untuk menciptakan desain pengendaliannya. Risiko yang telah diidentifikasi harus dianalisis berdasarkan informasi yang akurat sehingga dapat diperoleh nilai kemungkinan dan dampak yang tepat. Ketepatan penilaian ini penting karena hasil yang diperoleh akan menentukan prioritas penanganannya. Proses ini membutuhkan proses analisis informasi dan peran serta pelaksana kegiatan yang sangat memahami proses operasionalnya dan bila dimungkinkan juga melibatkan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatannya. Tahapan dalam pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan berikut :

1. Menetapkan jenis analisis risiko sesuai tujuan, ketersediaan data, dan tingkat kedalaman analisis risiko yang dilakukan;
2. Melakukan analisis risiko terhadap sumber risiko;
3. Mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem serta mekanisme pengendalian, baik proses, peralatan, dan praktik yang ada;
4. Melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya suatu risiko dan dampaknya;
5. Melakukan analisis terhadap tingkat suatu risiko;
6. Melakukan analisis terhadap profil risiko atau peta risiko; dan
7. Melakukan analisis terhadap tingkat risiko gabungan (komposit)

Tingkat risiko dapat diketahui dengan menggunakan dua dimensi, yaitu:

1. Kemungkinan terjadinya risiko yang dinyatakan dalam frekuensi; dan
2. Tingkat dampak yang dihasilkan risiko.

Nilai kemungkinan terjadinya risiko diukur berdasarkan kriteria kemungkinan dan skala kemungkinan terjadinya risiko tersebut yang diuraikan sebagai berikut :

Kriteria dan Skala Kemungkinan Terjadi Resiko

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Sangat Kecil	Sangat kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	1
2	Kecil	Kecil kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun	2
3	Moderat	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	3
4	Hampir Pasti	Hampir pasti terjadi dalam periode 1 tahun	4
5	Pasti	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	5

Untuk tingkat dampak yang dihasilkan dari risiko diukur berdasarkan kriteria dampak dan skala dampak yang dihasilkan risiko tersebut yang diuraikan sebagai berikut :

Kriteria Skala Dampak Terjadi Resiko

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Individu	Berdampak terhadap Individu Pejabat/Pegawai atau berkaitan dengan Risiko Kepatuhan	1
2	Sub Unit Kerja	Berdampak terhadap Satuan Unit Kerja atau berkaitan dengan Risiko Pelaporan	2
3	Unit Kerja	Berdampak Terhadap Kantor Unit Kerja	3
4	Instansi	Berdampak terhadap Pemerintah Kota Denpasar.	4

Dari hasil penilaian kemungkinan risiko dan dampak risiko maka dapat diketahui tingkat risiko.

A. Identifikasi Risiko

Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak 47 risiko (populasi risiko) dengan rincian 6 Risiko Strategis Pemda (RSP), 6 Risiko Strategis OPD (RSO), 14 Risiko Operasional OPD (ROO) dan 21 Risiko Fraud (RF) sebagaimana terlampir pada Lampiran 1 (form 4).

B. Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko

Dari 47 risiko yang teridentifikasi (seluruhnya merupakan bagian dari usulan risiko kepada Unit Manajemen Risiko), telah dianalisis dengan hasil sebagai berikut :

Terdapat 6 jumlah risiko prioritas (RSP) yang di laksanakan di triwulan I Tahun 2025 pada lampiran 2 (form 5).

C. Kegiatan Pengendalian Pengelolaan Risiko Triwulan I

Terdapat 6 jumlah kegiatan pengendalian yang dilaksanakan di triwulan I Tahun 2025 pada Lampiran 3 (form 8).

BAB III

HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sudah tentu akan menemukan hambatan yang apabila tidak diupayakan pemecahannya akan berdampak buruk pada pencapaian kinerja organisasi. Dari 14 risiko operasional OPD (ROO), 21 risiko fraud (RF), dan 6 risiko strategis OPD (RSO) yang teridentifikasi semua risiko dapat terkendali dengan baik. Hambatan yang ditemukan yaitu dalam pelaksanaan pemenuhan Indikator Kinerja Utama yang sejalan dengan pemetaan Risiko Strategis Pemda (RSP), yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

No.	Risiko Strategis Pemda	Hambatan
1.	Tuntutan penguatan peningkatan kapabilitas APiP Pemerintah Kota Denpasar lebih optimal	Adanya percepatan timeline monitoring pengisian pemenuhan data PK APiP, hal tersebut menjadi hambatan dikarenakan belum berakhirnya periode triwulan I namun beberapa data sudah harus dipenuhi, untuk tetap mempertanggungjawabkan penyelesaian tugas data yang harus dipenuhi telah disusun kertas kerja prediksi untuk dicocokkan dengan realisasi riil saat cut off periode triwulan I sehingga pengisian data bisa segera dilaksanakan saat triwulan I sudah berakhir.
2.	Tuntutan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang lebih efektif	Inspektorat Daerah Kota Denpasar sampai dengan triwulan I Tahun 2025 dalam mendukung pelaksanaan maturitas SPIP Kota Denpasar, telah melaksanakan bimbingan teknis Manajemen Risiko dan SPIP Terintegrasi pada tanggal 19 Maret 2025.
3.	Tuntutan untuk mempertahankan Opini BPK (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar	Sampai dengan triwulan I Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kota Denpasar telah melakukan pendampingan BPK atas pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan dari tanggal 10 Februari sampai 21 Maret 2025.

No.	Risiko Strategis Pemda	Hambatan
4.	Menurunnya predikat RB OPD di Pemerintah Kota Denpasar	Sampai dengan Triwulan I <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> terus dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Denpasar untuk memfasilitasi OPD dalam pemenuhan data RB.
5.	Pelaksanaan SAKIP di lingkup Pemerintah Kota Denpasar belum baik	Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kota Denpasar sedang melaksanakan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah sesuai surat Nomor 700.1.2/779/ltko hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 tanggal 20 Pebruari 2025. Pada tanggal 17-18 Pebruari Inspektorat Daerah Kota Denpasar telah melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2024.
6.	Tuntutan untuk menurunkan temuan Pemerintah Kota Denpasar	Pelaksanaan <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> terus dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Denpasar untuk memfasilitasi OPD dalam merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatannya.

BAB IV
MONITORING DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

a) Keterjadian Risiko yang teridentifikasi

No.	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yang sudah ada	Rencana Tindak Pengendalian	Terjadi / Tidak Terjadi	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tuntutan penguatan peningkatan kapabilitas APIP Pemerintah Kota Denpasar lebih optimal	Melakukan pelatihan dalam rangka penilaian Kapabilitas APIP dengan mengundang Narasumber dari BPKP	Melakukan pelatihan baik daring ataupun luring untuk memaksimalkan kapabilitas APIP dan mempertahankan Level Kapabilitas APIP	Sd Triwulan I risiko tidak terjadi	Rencana Tindak Pengendalian pada kolom 4 sudah dilaksanakan sehingga risiko pada kolom 2 tidak terjadi sampai dengan triwulan I Tahun 2025
2.	Tuntutan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang lebih efektif	Melaksanakan Pelatihan SPIP melalui daring dengan narasumber dari BPKP	Melakukan pelatihan/pembinaan penyelenggaraan SPIP secara daring ataupun luring serta pengawasan dan evaluasi dalam memberikan rekomendasi atas evaluasi penyelenggaraan SPIP	Sd Triwulan I risiko tidak terjadi	Rencana Tindak Pengendalian pada kolom 4 sudah dilaksanakan sehingga risiko pada kolom 2 tidak terjadi sampai dengan triwulan I Tahun 2025
3.	Tuntutan untuk mempertahankan Opini BPK (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah kota Denpasar	Terlaksananya revidi LKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Memaksimalkan pelaksanaan <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> kepada OPD binaan dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan	Sd Triwulan I risiko tidak terjadi	Rencana Tindak Pengendalian pada kolom 4 sudah dilaksanakan sehingga risiko pada kolom 2 tidak terjadi sampai dengan triwulan I Tahun 2025
4.	Menurunnya predikat RB OPD di Pemerintah Kota Denpasar	Terlaksananya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di	Memaksimalkan pelaksanaan <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> kepada OPD binaan dalam	Sd Triwulan I risiko tidak terjadi	Rencana Tindak Pengendalian pada kolom 4 sudah dilaksanakan sehingga risiko pada kolom 2 tidak

No.	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yang sudah ada	Rencana Tindak Pengendalian	Terjadi / Tidak Terjadi	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	rangka pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi.		terjadi sampai dengan triwulan I Tahun 2025
5.	Pelaksanaan SAKIP di lingkup Pemerintah Kota Denpasar belum baik	Terlaksananya Penilaian Monitoring dan Evaluasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Memaksimalkan pelaksanaan <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> kepada OPD binaan dalam rangka pemenuhan dokumen SAKIP	Sd Triwulan I risiko tidak terjadi	Rencana Tindak Pengendalian pada kolom 4 sudah dilaksanakan sehingga risiko pada kolom 2 tidak terjadi sampai dengan triwulan I Tahun 2025
6.	Tuntutan untuk menurunkan temuan Pemerintah Kota Denpasar	Melakukan Reviu, Monitoring dan Evaluasi serta pendampingan kepada OPD binaan	Memaksimalkan pelaksanaan <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> kepada OPD binaan dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sd Triwulan I risiko tidak terjadi	Rencana Tindak Pengendalian pada kolom 4 sudah dilaksanakan sehingga risiko pada kolom 2 tidak terjadi sampai dengan triwulan I Tahun 2025

Form 7 MR Tahun 2025 (data diolah)

b) Keterjadian Risiko yang belum teridentifikasi

Dari Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas Risiko Strategis Pemda (RSP) yang dimonitoring terdapat kejadian risiko yang disebabkan oleh faktor eksternal sampai dengan triwulan I belum ada risiko yang terjadi.

BAB V PENUTUP

Manajemen Risiko Inspektorat Daerah Kota Denpasar merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini perlu disampaikan bahwa seiring berjalannya waktu perlu adanya identifikasi ulang atas risiko yang terjadi, yang disebabkan oleh perubahan regulasi maupun faktor eksternal lainnya sehingga keterjadian risiko tersebut diluar kendali OPD. Untuk itu komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian intern yang dilaksanakan, sehingga peningkatan penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat tercapai.

Denpasar, 27 Maret 2025
Inspektur Daerah Kota Denpasar,



Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19650726 199201 2 001

LAMPIRAN

Form 2.b
Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Daerah Kota Denpasar	
Penilaian Tahun	:	2025	
Periode yang Dinilai	:	RPJMD 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	:	Unsur Pengawasan Pemerintah	
OPD yang Dinilai	:	Inspektorat	
Sumber Data	Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026		
Tujuan Strategis	Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		
Sasaran Strategis	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi		
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target
	1	Level Kapabilitas APIP	Level 3
	2	Level Maturitas SPIP	Level 3
	3	Persentase OPD yang didampingi/yang mendapat pendampingan	80%
Program			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		
	Sasaran Strategis: Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi		
	IKU Strategis: 1. Level Kapabilitas APIP 2. Level Maturitas SPIP 3. Persentase OPD yang yang didampingi/yang mendapat pendampingan		
	Program: 1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		

Denpasar, 5 Januari 2025
Inspektur Daerah Kota Denpasar


 Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650726 199201 2 001

Form 2.c
Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Daerah Kota Denpasar	
Penilaian Tahun	:	2025	
Periode yang Dinilai	:	RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	:	Unsur Pengawasan Pemerintahan	
OPD yang Dinilai	:	Inspektorat	
Sumber Data	Renja Inspektorat Tahun 2024		
Tujuan Strategis	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		
Program Inspektorat Kota Denpasar (Renja tahun 2024)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 		
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1 Kegiatan
	2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1 Laporan
	3	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	1 Kegiatan
	4	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	36 OPD
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 4. Pendampingan dan Asistensi <p>Keluaran/Hasil Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 3. Terlaksananya Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi 4. Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah 		
 <p style="text-align: center;">Denpasar, 5 Januari 2025 Inspektur Daerah Kota Denpasar</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. Putu Naning Djavaningsih, M.Si</u> Pembina Utama Muda NIP. 19650726 199201 2 001</p>			

Form 2.c.1
Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Daerah Kota Denpasar	
Penilaian Tahun	:	2025	
Periode yang Dinilai	:	RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	:	Unsur Pengawasan Pemerintahan	
OPD yang Dinilai	:	Inspektorat	
Sumber Data	Renja Inspektorat Tahun 2024		
Tujuan Strategis	Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		
Program Inspektorat Kota Denpasar (Renja tahun 2024)	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1 Kegiatan
	2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1 Laporan
	3	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	1 Kegiatan
	4	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	36 OPD
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program: 1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Kegiatan: 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 4. Pendampingan dan Asistensi Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 3. Terlaksananya Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi 4. Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah		
 <p style="text-align: center;">Denpasar, 5 Januari 2025 Inspektur Daerah Kota Denpasar  <u>Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si</u> Pembina Utama Muda NIP. 19650726 199201 2 001</p>			

Form 3.a
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda : Pemerintah Daerah Kota Denpasar Nama OPD : Inspektorat Kota Denpasar Tahun Penilaian : 2025 Periode yang dinilai : RPJMD Tahun 2021-2026 Urusan Pemerintahan : Unsur Pengawasan Pemerintahan										
No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program Unggulan	Indikator Kinerja	Uraian	Risiko		Sebab			Dampak	
				Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tujuan Strategis Pemerintah: Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi									
	Sasaran : Meningkatnya Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi									
1	Program: Penyelenggaraan Program Pengawasan	1. Level Kapabilitas APIP 2. Level Maturitas SPIP	Tuntutan Penguatan dan Peningkatan Kapabilitas APIP Pemerintah Kota Denpasar lebih optimal	RSP.25.35.04.01	Kepala Daerah	Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran penguatan Kapabilitas APIP termasuk sarana dan prasarana pendukung belum optimal	Internal	C	Level Kapabilitas APIP menjadi di level 2	Kepala Daerah dan OPD terkait
			Tuntutan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang lebih efektif	RSP.25.35.04.02	Kepala Daerah	Kurangnya koordinasi, sosialisasi dan pemahaman OPD terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah	Internal dan Eksternal	C	Level Maturitas SPIP tidak bisa mempertahankan level 3	Kepala Daerah dan OPD terkait
			Tuntutan untuk mempertahankan Opini BPK (WTP) terhadap laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar	RSP.25.35.04.03	Kepala Daerah	Adanya faktor-faktor indikasi terjadinya fraud yang terjadi pada proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Internal dan Eksternal	C	Opini BPK (WTP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar tidak bisa dipertahankan	Kepala Daerah dan OPD terkait
2	Program : Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi	Persentase OPD yang mendapat pendampingan Inspektorat	Menurunnya Predikat Reformasi Birokrasi OPD di Pemerintah Kota Denpasar	RSP.25.35.04.04	Kepala Daerah	Masih ada program kerja pada OPD yang belum tepat sasaran, belum inovatif dan kreatif serta adaptif terhadap perubahan di dalam melakukan pelayanan publik.	Internal dan Eksternal	C	tidak bisa dipertahankan Predikat Reformasi Birokrasi minimal BB di Pemerintah Kota Denpasar	Kepala Daerah dan OPD terkait

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program Unggulan	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pelaksanaan SAKIP di lingkup Pemerintah Kota Denpasar belum baik	RSP.25.35.04.05	Kepala Daerah	Kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara belum optimal	Internal dan Eksternal	C	tidak tercapainya hasil evaluasi SAKIP minimal A	Kepala Daerah dan OPD terkait
			Tuntutan untuk menurunkan temuan pada Pemerintah Kota Denpasar	RSP.25.35.04.06	Kepala Daerah	Kurangnya pendampingan dari Inspektorat untuk mencegah terjadinya temuan pada OPD binaan	Internal	C	Tingkat kepatuhan atas perundang-undangan yang berlaku masih rendah	Kepala Daerah dan OPD terkait



 Denpasar, 5 Januari 2025
 Inspektur Daerah Kota Denpasar

 F. Putu Naring Diawangsiti, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19850726 199201 2 001

Form 3.b
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar								
Nama OPD		: Inspektorat								
Tahun Penilaian		: 2025								
Periode yang dinilai		: Renstra Tahun 2021 - 2026								
Tujuan Strategis		: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik								
Urusan Pemerintahan		: Unsur Pengawasan Pemerintahan								
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
1										
	Tujuan: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik									
	Sasaran: Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi									
1	Program: Program Penyelenggaraan Pengawasan	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Denpasar	Tuntutan Penguatan dan Pertahanan Level Kapabilitas APIP Inspektorat	RSO.25.35.04.01	Inspektur	Kurangnya SDM APIP yang memadai dan berkompeten serta kurangnya sarana prasarana pendukung pengawasan oleh APIP	Internal	C	Level Kapabilitas APIP Inspektorat menjadi level 2	Kepala Daerah
			Tuntutan pertahanan Level Penilaian Maturitas SPIP Pemerintah Kota Denpasar	RSO.25.35.04.02	Inspektur	Kurangnya koordinasi, sosialisasi dan pemahaman OPD terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk belum adanya sistem berbasis teknologi yang mempermudah proses.	Internal dan Eksternal	C	Penilaian Maturitas SPIP Pemerintah Kota Denpasar menjadi level 2	Kepala Daerah
			Tuntutan pertahanan nilai pemenuhan MCP Kota Denpasar	RSO.25.35.04.03	Inspektur	Kurangnya koordinasi, sosialisasi dan pemahaman OPD terhadap pemenuhan area MCP.	Internal dan Eksternal	C	Tidak tercapainya nilai pemenuhan MCP Kota Denpasar minimal 80%	Kepala Daerah dan OPD terkait

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
2	Program : Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi	Persentase OPD yang didampingi/ yang mendapat pendampingan	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK, BPKP, Itprov, dan Itko tidak sesuai target.	RSO.25.35.04.04	Inspektur	Kurangnya koordinasi, pemahaman dan komitmen OPD dalam penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK, BPKP, Itprov, dan Itko	Internal dan Eksternal	C	Tidak tercapainya target penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK, BPKP, Itprov, dan Itko sebesar 90 %	Kepala Daerah dan OPD terkait	
			Kurangnya kualitas Pelaksanaan Benturan Kepentingan dan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	RSO.25.35.04.05	Inspektur	Koordinasi, sosialisasi dan pemahaman OPD terhadap Pelaksanaan Benturan Kepentingan dan Gratifikasi belum optimal.	Internal dan Eksternal	C	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) menjadi rendah yang menggambarkan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi di Kota Denpasar menjadi diragukan	Kepala Daerah dan OPD terkait	
			Menurunnya Persentase OPD yang mendapatkan pendampingan Inspektorat	RSO.25.35.04.06	Inspektur	kurangnya tenaga pendamping dari Inspektorat Kota Denpasar	Internal	C	Kurang optimalnya pemenuhan dokumen serta perbaikan hasil evaluasi secara tepat waktu dan tepat sasaran.	OPD yang terkait	

Denpasar, 5 Januari 2025
 Inspektur Daerah Kota Denpasar

 Ir. Putu Naning Djavaningsih, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660726 199201 2 001



Form 3.c
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah Daerah Kota Denpasar Nama OPD : Inspektorat Tahun Penilaian : 2025 Periode yang dinilai : Renstra Tahun 2021 - 2026 Tujuan Strategis : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Sasaran Strategis OPD : Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Urusan Pemerintahan : Unsur Pengawasan Pemerintahan											
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Pemilik	Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Pelaksanaan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak sesuai kebutuhan	ROO.25.35.04.01	Inspektur/ Sekretaris	Kurang tertibnya alur pelaporan pegawai kepada Bendahara Gaji terkait status tunjangan anak, kenaikan pangkat maupun kenaikan berkala	internal	C	Anggaran yang tersedia melebihi/kurang dari kebutuhan	Inspektur/ Sekretaris
1	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Pelaksanaan	Terjadi kekurangan anggaran pembayaran gaji & tunjangan ASN	ROO.25.35.04.02	Inspektur/ Sekretaris	1. Bendahara gaji kurang cermat dalam menyusun perhitungan kebutuhan gaji 2. Terdapat pegawai mutasi	internal	C	Terlambatnya proses pembayaran gaji ASN	Inspektur/ Sekretaris
			Pelaksanaan	Terjadi gratifikasi dalam proses penyusunan anggaran Gaji ASN	RF.25.35.04.01	Inspektur/ Sekretaris	1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	internal	C	Penyusunan anggaran tidak berbasis kinerja	Inspektur/ Sekretaris
			Pertanggung jawaban	Kerugian keuangan negara akibat kurang tertibnya administrasi kepegawaian terkait gaji/ pendapatan pegawai	RF.25.35.04.02	Inspektur/ Sekretaris	Kurang tertibnya alur pelaporan pegawai kepada Bendahara Gaji terkait status tunjangan anak	internal	C	Terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan rutin	Inspektur/ Sekretaris
2	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Pelaksanaan	Benturan kepentingan pelaksanaan diklat masing-masing APIP	ROO.25.35.04.03	Inspektur/ Sekretaris/ Irban	Adanya hal-hal tidak terduga (upacara agama, hal lainnya) yang dialami APIP	internal	C	Tidak sesuai rencana diklat dengan realisasi diklat	Inspektur/ Sekretaris/ Irban
			Pelaksanaan	Benturan kepentingan dalam proses penetapan penyedia barang dan jasa	RF.25.35.04.03	Inspektur/ Sekretaris	Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang dan jasa	internal	C	Terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan	Inspektur/ Sekretaris
			Pertanggung jawaban	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.35.04.04	Inspektur/ Sekretaris	1) lemahnya pengawasan 2) lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) untuk mendapatkan keuntungan pribadi	internal	C	berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Inspektur/ Sekretaris
3	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Perencanaan	Penyusunan anggaran barang pakai habis tidak memenuhi kebutuhan riil	ROO.25.35.04.04	Inspektur/ Sekretaris	Penyusunan kebutuhan barang pakai habis untuk tahun n+1 tidak berdasarkan pada daftar inventaris ataupun daftar stock opname	internal	C	Timbulnya praktik KKN	Inspektur/ Sekretaris
			Perencanaan	Terjadi keterlambatan pengajuan draft SK Walikota	ROO.25.35.04.05	Inspektur/ Sekretaris	Kurang mencermati timeline pekerjaan	internal	C	Tidak memiliki dasar hukum atas pekerjaan dimaksud	Inspektur/ Sekretaris

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab			C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
					Risiko							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pelaksanaan	Benturan kepentingan dalam proses penetapan penyedia barang dan jasa	RF.25.35.04.05	Inspektur/ Sekretaris	Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang dan jasa	internal	C	Terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan	Inspektur/ Sekretaris	
			Pertanggung jawaban	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.35.04.06	Inspektur/ Sekretaris	1) lemahnya pengawasan 2) lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) untuk mendapatkan keuntungan pribadi	internal	C	berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Inspektur/ Sekretaris	
4	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pelaksanaan	Benturan kepentingan dalam penetapan rekanan sebagai penyedia barang dan jasa	ROO.25.35.04.06	Inspektur/ Sekretaris	Adanya intervensi pihak tertentu dalam proses pengadaan	internal	C	Timbulnya praktik KKN	Inspektur/ Sekretaris	
			Pelaksanaan	Tidak terakomodirnya rencana pengadaan barang ke dalam RKBMD	RF.25.35.04.07	Inspektur/ Sekretaris	Rencana pengadaan barang belum terekap secara menyeluruh untuk diajukan ke BPKAD	internal	C	Kegiatan pengadaan barang tidak dapat dilaksanakan sehingga menyebabkan SILPA	Inspektur/ Sekretaris	
			Pertanggung jawaban	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.35.04.08	Inspektur/ Sekretaris	1) lemahnya pengawasan 2) lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) untuk mendapatkan keuntungan pribadi	internal	C	berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Inspektur/ Sekretaris	
5	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Pelaksanaan	Peningkatan tagihan Sumber Daya Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	ROO.25.35.04.07	Inspektur/ Sekretaris	Kenaikan tarif yang tidak dapat diprediksi karena adanya kebocoran pipa ataupun kesalahan billing/pencurian kuota	internal	C	Perlunya penyesuaian anggaran	Inspektur/ Sekretaris	
			Pelaksanaan	Benturan kepentingan dalam proses penetapan penyedia barang dan jasa	RF.25.35.04.09	Inspektur/ Sekretaris	Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang dan jasa	internal	C	Terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan	Inspektur/ Sekretaris	
			Pertanggung jawaban	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.35.04.10	Inspektur/ Sekretaris	1) lemahnya pengawasan 2) lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) untuk mendapatkan keuntungan pribadi	internal	C	berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Inspektur/ Sekretaris	
6	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pelaksanaan	Barang elektronik yang memerlukan perbaikan besar	ROO.25.35.04.08	Inspektur/ Sekretaris	Penggunaan barang melebihi umur ekonomis	internal	C	Terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan	Inspektur/ Sekretaris	
			Pelaksanaan	Peningkatan kebutuhan belanja pemeliharaan	RF.25.35.04.11	Inspektur/ Sekretaris	Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang dan jasa	internal	C	Terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan	Inspektur/ Sekretaris	

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab			C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
					Risiko							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pertanggungjawaban	Penggunaan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi / kelompok diluar kebutuhan jabatan	RF.25.35.04.12	Inspektur/ Sekretaris	Penyalahgunaan wawasan jabatan	internal	C	Kurangnya BMD yang dapat digunakan untuk memenuhi keperluan dinas pada saat dibutuhkan	Inspektur/ Sekretaris	
	Program : Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan)	Pelaksanaan	Level Kapabilitas APIP Inspektorat masih belum memadai	RSO.25.35.04.01	Inspektur	Kurangnya SDM APIP yang memadai dan berkompeten serta kurangnya sarana prasarana pendukung pengawasan oleh APIP	internal	C	Level Kapabilitas APIP Inspektorat menurun	Inspektur	
			Pelaksanaan	Tuntutan pertahanan Level Penilaian Maturitas SPIP Pemerintah Kota Denpasar	RSO.25.35.04.02	Inspektur	Kurangnya koordinasi, sosialisasi dan pemahaman OPD terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk belum adanya sistem berbasis teknologi yang mempermudah proses.	Internal dan Eksternal	C	Penilaian Maturitas SPIP Pemerintah Kota Denpasar menjadi level 2	Kepala Daerah	
			Pelaksanaan	Tuntutan pertahanan nilai pemenuhan MCP Kota Denpasar	RSO.25.35.04.03	Inspektur	Kurangnya koordinasi, sosialisasi dan pemahaman OPD terhadap pemenuhan area MCP.	Internal dan Eksternal	C	Tidak tercapainya nilai pemenuhan MCP Kota Denpasar minimal 80%	Kepala Daerah dan OPD terkait	
7	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal	Pelaksanaan	Persentase OPD yang jumlah temuannya minimal	ROO.25.35.04.09	Inspektur/ Irban	Ada ketidakpatuhan OPD terhadap peraturan perundang-undangan	internal	C	Jumlah temuan yang harus dituntaskan menjadi bertambah	Inspektur/ Irban	
			Pelaksanaan	Persentase OPD yang mendapat pengawasan dengan tujuan tertentu	ROO.25.35.04.10	Inspektur/ Irban	OPD kurang memahami peraturan perundang-undangan	internal	C	OPD berpotensi kena temuan dari hasil pemeriksaan APIP baik APIP internal dan eksternal	Inspektur/ Irban	
			Pelaksanaan	Gratifikasi dalam rangka manipulasi jumlah temuan	RF.25.35.04.13	Inspektur/ Sekretaris	Ada ketidakpatuhan OPD terhadap peraturan perundang-undangan	internal	C	tidak bisa mempertahankan opini WTP	Inspektur/ Irban	
			Pertanggungjawaban	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.35.04.14	Inspektur/ Sekretaris	1) lemahnya pengawasan 2) lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) untuk mendapatkan keuntungan pribadi	internal	C	berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Inspektur/ Sekretaris	
8	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Cakupan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Pelaksanaan	Tuntasnya OPD yang mendapat pengawasan dengan tujuan tertentu	ROO.25.35.04.11	Inspektur/ Irban	Ada ketidakpatuhan OPD terhadap peraturan perundang-undangan	internal	C	tidak bisa mempertahankan opini WTP	Inspektur/ Irban	
			Pelaksanaan	Gratifikasi dalam rangka manipulasi jumlah temuan	RF.25.35.04.15	Inspektur/ Irban	Ada ketidakpatuhan OPD terhadap peraturan perundang-undangan	internal	C	tidak bisa mempertahankan opini WTP	Inspektur/ Irban	

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab			C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
					Risiko							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pertanggung jawaban	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.35.04.16	Inspektur/ Sekretaris	1) lemahnya pengawasan 2) lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) untuk mendapatkan keuntungan pribadi	internal	C	berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Inspektur/ Sekretaris	
	Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan kegiatan yang bersifat consulting (konsultasi)	Pelaksanaan	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK, BPKP, Itprov, dan Itko tidak sesuai target.	RSO.25.35.04.04	Inspektur	Kurangnya koordinasi, pemahaman dan komitmen OPD dalam penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK, BPKP, Itprov, dan Itko	Internal dan Eksternal	C	Tidak tercapainya target penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK, BPKP, Itprov, dan Itko sebesar 90 %	Kepala Daerah dan OPD terkait	
			Pelaksanaan	Kurangnya kualitas Pelaksanaan Benturan Kepentingan dan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	RSO.25.35.04.05	Inspektur	Koordinasi, sosialisasi dan pemahaman OPD terhadap Pelaksanaan Benturan Kepentingan dan Gratifikasi belum optimal.	Internal dan Eksternal	C	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) menjadi rendah yang menggambarkan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi di Kota Denpasar menjadi diragukan	Kepala Daerah dan OPD terkait	
			Pelaksanaan	Menurunnya Persentase OPD yang mendapatkan pendampingan Inspektorat	RSO.25.35.04.06	Inspektur	kurangnya tenaga pendamping dari Inspektorat Kota Denpasar	Internal	C	Kurang optimalnya pemenuhan dokumen serta perbaikan hasil evaluasi secara tepat waktu dan tepat sasaran.	OPD yang terkait	
9	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Cakupan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan	Pelaksanaan	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan pemahaman aparatur terhadap akuntabilitas kinerja	ROO.25.35.04.12	Inspektur/ Irban	OPD mendapatkan kendala atau belum memenuhi penuntasan temuan	internal	C	Persentase penuntasan temuan dibawah 80%	Inspektur/ Irban	
			Pelaksanaan	Gratifikasi dalam rangka manipulasi jumlah temuan	RF.25.35.04.17	Inspektur/ Irban	Ada ketidakpatuhan OPD terhadap peraturan perundang-undangan	internal	C	tidak bisa mempertahankan opini WTP	Inspektur/ Irban	
			Pertanggung jawaban	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.35.04.18	Inspektur/ Sekretaris	1) lemahnya pengawasan 2) lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) untuk mendapatkan keuntungan pribadi	internal	C	berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Inspektur/ Sekretaris	
10	Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi	Cakupan penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	Pelaksanaan	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan OPD sesuai peraturan perundang-undangan	ROO.25.35.04.13	Inspektur/ Sekretaris/ Irban	Tidak seimbang antara tenaga pendamping dengan jumlah OPD yang mohon pendampingan	internal	C	Level Maturitas SPIP menurun	Inspektur/ Sekretaris/ Irban	
			Pelaksanaan	Persentase OPD yang didampingi/ yang mendapat pendampingan	ROO.25.35.04.14	Inspektur/ Sekretaris/ Irban	Masa Pensiun, Rotasi dan Mutasi ASN APIP	internal	C	Level kapabilitas APIP menurun	Inspektur/ Sekretaris/ Irban	

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab			C/A/C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelaksanaan	Gratifikasi dalam rangka manipulasi jumlah temuan	RF.25.35.04.19	Inspektur/ Irban	Ada ketidakpatuhan OPD terhadap peraturan perundang-undangan	internal	C	tidak bisa mempertahankan opini WTP	Inspektur/ Irban
			Pelaksanaan	Penipuan atas penyedia fiktif dalam pemilihan penyedia kegiatan	RF.25.35.04.20	Inspektur/ Sekretaris	1) lemahnya pengawasan 2) lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) untuk mendapatkan keuntungan pribadi	internal	C	berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Inspektur/ Sekretaris
			Pertanggung jawaban	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.35.04.21	Inspektur/ Sekretaris	1) lemahnya pengawasan 2) lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) untuk mendapatkan keuntungan pribadi	internal	C	berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Inspektur/ Sekretaris



Form 4
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Denpasar				
Tahun Penilaian	: 2025				
Tujuan Strategis	: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pengawasan Pemerintahan				
Analisis Risiko					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
1	2	3	4	5	6=4x5
I	Risiko Strategis Pemda				
1	Tuntutan Penguatan dan Peningkatan Kapabilitas APIP Pemerintah Kota Denpasar lebih optimal	RSP.25.35.04.01	4	4	16
2	Tuntutan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang lebih efektif	RSP.25.35.04.02	4	4	16
3	Tuntutan untuk mempertahankan Opini BPK (WTP) terhadap laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar	RSP.25.35.04.03	4	4	16
4	Tuntutan Predikat Reformasi Birokrasi OPD di Pemerintah Kota Denpasar	RSP.25.35.04.04	4	4	16
5	Pelaksanaan SAKIP di lingkup Pemerintah Kota Denpasar belum baik	RSP.25.35.04.05	4	4	16
6	Tuntutan untuk menurunkan temuan Pemerintah Kota Denpasar	RSP.25.35.04.06	4	4	16
II	Risiko Strategis OPD				
1	Kurangnya kualitas Pelaksanaan Benturan Kepentingan dan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	RSO.25.35.04.05	3	3	9
2	Menurunnya Persentase OPD yang mendapatkan pendampingan Inspektorat	RSO.25.35.04.06	3	3	9
3	Tuntutan Penguatan dan Pertahanan Level Kapabilitas APIP Inspektorat	RSO.25.35.04.01	3	1	3

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
1	2	3	4	5	6=4x5
4	Tuntutan pertahanan Level Penilaian Maturitas SPIP Pemerintah Kota Denpasar	RSO.25.35.04.02	2	1	2
5	Tuntutan pertahanan nilai pemenuhan MCP Kota Denpasar	RSO.25.35.04.03	2	1	2
6	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK, BPKP, Itprov, dan Itko tidak sesuai target.	RSO.25.35.04.04	2	1	2
II	Risiko Operasional OPD				
1	Benturan kepentingan dalam penetapan rekanan sebagai penyedia barang dan jasa	ROO.25.35.04.06	3	3	9
2	Barang elektronik yang memerlukan perbaikan besar	ROO.25.35.04.08	3	3	9
3	Terjadi keterlambatan pengajuan draft SK Walikota	ROO.25.35.04.05	3	2	6
4	Benturan kepentingan pelaksanaan diklat masing-masing APIP	ROO.25.35.04.03	3	1	3
5	Persentase OPD yang mendapat pengawasan dengan tujuan tertentu	ROO.25.35.04.10	3	1	3
6	Tuntasnya OPD yang mendapat pengawasan dengan tujuan tertentu	ROO.25.35.04.11	3	1	3
7	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan pemahaman aparatur terhadap akuntabilitas kinerja	ROO.25.35.04.12	3	1	3
8	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan OPD sesuai peraturan perundang-undangan	ROO.25.35.04.13	3	1	3
9	Persentase OPD yang didampingi/ yang mendapat pendampingan	ROO.25.35.04.14	3	1	3
10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak sesuai kebutuhan	ROO.25.35.04.01	2	1	2
11	Terjadi kekurangan anggaran pembayaran gaji & tunjangan ASN	ROO.25.35.04.02	2	1	2
12	Penyusunan anggaran barang pakai habis tidak memenuhi kebutuhan riil	ROO.25.35.04.04	2	1	2

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
1	2	3	4	5	6=4x5
13	Peningkatan tagihan Sumber Daya Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	ROO.25.35.04.07	2	1	2
14	Persentase OPD yang jumlah temuannya minimal	ROO.25.35.04.09	2	1	2
	Risiko Fraud (RF)				
1	Tidak terakomodirnya rencana pengadaan barang ke dalam RKBMD	RF.25.35.04.07	3	3	9
2	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.35.04.08	3	3	9
3	Peningkatan kebutuhan belanja pemeliharaan	RF.25.35.04.11	3	3	9
4	Penggunaan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi / kelompok diluar kebutuhan jabatan	RF.24.35.04.12	3	3	9
5	Kerugian keuangan negara akibat kurang tertibnya administrasi kepegawaian terkait gaji/ pendapatan pegawai	RF.25.35.04.02	3	1	3
6	Benturan kepentingan dalam proses penetapan penyedia barang dan jasa	RF.25.35.04.03	3	1	3
7	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.35.04.04	3	1	3
8	Gratifikasi dalam rangka manipulasi jumlah temuan	RF.25.35.04.13	3	1	3
9	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.35.04.14	3	1	3
10	Gratifikasi dalam rangka manipulasi jumlah temuan	RF.25.35.04.15	3	1	3
11	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.35.04.16	3	1	3
12	Gratifikasi dalam rangka manipulasi jumlah temuan	RF.25.35.04.17	3	1	3
13	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.35.04.18	3	1	3

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko 6=4x5
1	2	3	4	5	6=4x5
14	Gratifikasi dalam rangka manipulasi jumlah temuan	RF.25.35.04.19	3	1	3
15	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.35.04.21	3	1	3
16	Terjadi gratifikasi dalam proses penyusunan anggaran Gaji ASN	RF.25.35.04.01	2	1	2
17	Benturan kepentingan dalam proses penetapan penyedia barang dan jasa	RF.25.35.04.05	2	1	2
18	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.35.04.06	2	1	2
19	Benturan kepentingan dalam proses penetapan penyedia barang dan jasa	RF.25.35.04.09	2	1	2
20	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.35.04.10	2	1	2
21	Penipuan atas penyedia fiktif dalam pemilihan penyedia kegiatan	RF.25.35.04.20	2	1	2

Denpasar, 5 Januari 2025
 Inspektur Daerah Kota Denpasar



Ir. Putu Naniq Djayaningsih, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650726 199201 2 001

Form 5
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar				
Tahun Penilaian		: 2025				
Tujuan Strategis		: Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik				
Urusan Pemerintahan		: Unsur Pengawasan Pemerintahan				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
1	Risiko Strategis Pemda					
1	Tuntutan Penguatan dan Peningkatan Kapabilitas APIP Pemerintah Kota Denpasar lebih optimal	RSP.25.35.04.01	16	Kepala Daerah	Ketersedian Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran penguatan Kapabilitas APIP termasuk sarana dan prasarana pendukung belum optimal	Level Kapabilitas APIP menjadi di level 2
2	Tuntutan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang lebih efektif	RSP.25.35.04.02	16	Kepala Daerah	Kurangnya koordinasi, sosialisasi dan pemahaman OPD terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah	Level Maturitas SPIP tidak bisa mempertahankan level 3
3	Tuntutan untuk mempertahankan Opini BPK (WTP) terhadap laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar	RSP.25.35.04.03	16	Kepala Daerah	Adanya faktor-faktor indikasi terjadinya fraud yang terjadi pada proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Opini BPK (WTP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar tidak bisa dipertahankan
4	Menurunnya Predikat Reformasi Birokrasi OPD di Pemerintah Kota Denpasar	RSP.24.35.04.04	16	Kepala Daerah	Masih ada program kerja pada OPD yang belum tepat sasaran, belum inovatif dan kreatif serta adaptif terhadap perubahan di dalam melakukan pelayanan publik.	Tidak bisa dipertahankan Predikat Reformasi Birokrasi minimal BB di Pemerintah Kota Denpasar

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
5	Pelaksanaan SAKIP di lingkup Pemerintah Kota Denpasar belum baik	RSP.25.35.04.05	16	Kepala Daerah	Kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara belum optimal	Tidak tercapainya hasil evaluasi SAKIP minimal A
6	Tuntutan untuk menurunkan temuan Pemerintah Kota Denpasar	RSP.25.35.04.06	16	Kepala Daerah	Kurangnya pendampingan dari Inspektorat untuk mencegah terjadinya temuan pada OPD binaan	Tingkat kepatuhan atas perundang-undangan yang berlaku masih rendah
II	Risiko Strategis OPD					
NIHIL (tidak ada risiko yang diatas selera risiko)						
II	Risiko Operasional OPD					
NIHIL (tidak ada risiko yang diatas selera risiko)						

Denpasar, 5 Januari 2025
 Inspektur Daerah Kota Denpasar



Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650726 199201 2 001

Form 7
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

Nama Pemda		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian		: 2025					
Tujuan Strategis		: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik					
Urusan Pemerintahan		: Unsur Pengawasan Pemerintahan					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Risiko Strategis Pemda						
1	Tuntutan Penguatan dan Peningkatan Kapabilitas APIP Pemerintah Kota Denpasar lebih optimal	RSP.25.35.04.01	Melakukan Pelatihan dalam rangka penilaian Kapabilitas APIP dengan mengundang Narasumber dari BPKP	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan pelatihan baik daring ataupun luring untuk memaksimalkan kapabilitas APIP dan mempertahankan Level Kapabilitas APIP	Kepala Daerah	1 Tahun
2	Tuntutan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang lebih efektif	RSP.25.35.04.02	Melaksanakan Pelatihan SPIP melalui daring dengan Narasumber dari BPKP	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan pelatihan/pembinaan penyelenggaraan SPIP secara daring ataupun luring serta pengawasan dan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas evaluasi penyelenggaraan SPIP	Kepala Daerah	1 Tahun
3	Tuntutan untuk mempertahankan Opini BPK (WTP) terhadap laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar	RSP.25.35.04.03	Terlaksananya reviu LKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Memaksimalkan pelaksanaan <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> kepada OPD binaan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan.	Kepala Daerah	1 Tahun
4	Menurunnya Predikat Reformasi Birokrasi OPD di Pemerintah Kota Denpasar	RSP.25.35.04.04	Terlaksananya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Memaksimalkan pelaksanaan <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> kepada OPD binaan dalam rangka pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi.	Kepala Daerah	1 Tahun
5	Pelaksanaan SAKIP di lingkup Pemerintah Kota Denpasar belum baik	RSP.25.35.04.05	Terlaksananya Penilaian, Monitoring dan Evaluasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Memaksimalkan pelaksanaan <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> kepada OPD binaan dalam rangka pemenuhan dokumen SAKIP.	Kepala Daerah	1 Tahun

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	
a	b	c	d	e	f	g	h	
6	Tuntutan untuk menurunkan temuan Pemerintah Kota Denpasar	RSP.25.35.04.06	Melakukan Reviu, Monitoring dan Evaluasi serta, Pendampingan kepada OPD binaan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Memaksimalkan pelaksanaan <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> kepada OPD binaan dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Kepala Daerah	1 Tahun	
II	Risiko Strategis OPD		NIHIL (tidak ada risiko yang diatas selera risiko)					
II	Risiko Operasional OPD		NIHIL (tidak ada risiko yang diatas selera risiko)					



 Denpasar, 5 Januari 2025
 Inspektur Daerah Kota Denpasar

 Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650726 199201 2 001

Form 8

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DI BANGUN

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar : 2025 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik : Unsur Pengawasan Pemerintahan					
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Pemda						
1	Melakukan pelatihan baik daring ataupun luring untuk memaksimalkan kapabilitas APIP dan mempertahankan Level Kapabilitas APIP	1 Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Surat Undangan 4. Pelaksanaan Kegiatan	Inspektorat Kota Denpasar, BPKP Perwakilan Provinsi Bali	Pemerintah Kota Denpasar	1 Tahun	1 Tahun	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumen berupa pemenuhan penilaian kapabilitas APIP
2	Melakukan pelatihan/pembinaan penyelenggaraan SPIP secara daring ataupun luring serta pengawasan dan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas evaluasi penyelenggaraan SPIP	1 Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Surat Undangan 4. Pelaksanaan Kegiatan	Inspektorat Kota Denpasar, BPKP Perwakilan Provinsi Bali	Perangkat Daerah Terkait	1 Tahun	1 Tahun	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumen berupa pemenuhan dokumen SPIP
3	Memaksimalkan pelaksanaan <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> kepada OPD binaan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan.	1 Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Surat Undangan 4. Pelaksanaan Kegiatan	Inspektorat Kota Denpasar, BPK RI	Perangkat Daerah Terkait	1 Tahun	1 Tahun	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumen berupa laporan LHP BPK Perwakilan Provinsi Bali
4	Memaksimalkan pelaksanaan <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> kepada OPD binaan dalam rangka pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi.	1 Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Surat Undangan 4. Pelaksanaan Kegiatan	Inspektorat Kota Denpasar, MENPAN RB	Perangkat Daerah Terkait	1 Tahun	1 Tahun	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumen berupa pemenuhan dokumen RB

No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
5	Memaksimalkan pelaksanaan <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> kepada OPD binaan dalam rangka pemenuhan dokumen SAKIP.	1 Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Surat Undangan 4. Pelaksanaan Kegiatan	Inspektorat Kota Denpasar, MENPAN RB	Perangkat Daerah Terkait	1 Tahun	1 Tahun	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumen berupa pemenuhan dokumen SAKIP
6	Memaksimalkan pelaksanaan <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> kepada OPD binaan dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1 Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Surat Undangan 4. Pelaksanaan Kegiatan	Inspektorat Kota Denpasar, Inspektorat Provinsi Bali, BPK, BPKP	Perangkat Daerah Terkait	1 Tahun	1 Tahun	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumen berupa Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Hasil Reviu (LHR), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
II	Risiko Strategis OPD						
	Nama OPD : Inspektorat						
		NIHIL (tidak ada risiko yang diatas selera risiko)					
III	Risiko Operasional OPD						
	Nama OPD : Inspektorat						
		NIHIL (tidak ada risiko yang diatas selera risiko)					

Denpasar, 5 Januari 2025
 Inspektur Daerah Kota Denpasar



Ir. Putu Nani Djayaningsih, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650726 199201 2 001



Form 9

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar : 2025 : Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik : Unsur Pengawasan Pemerintahan				
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Melakukan pelatihan baik daring ataupun luring untuk memaksimalkan kapabilitas APIP dan mempertahankan Level Kapabilitas APIP	1 Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Surat Undangan 4. Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kegiatan telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan
2	Melakukan pelatihan/pembinaan penyelenggaraan SPIP secara daring ataupun luring serta pengawasan dan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas evaluasi penyelenggaraan SPIP	1 Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Surat Undangan 4. Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kegiatan telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan
3	Memaksimalkan pelaksanaan <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> kepada OPD binaan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan.	1 Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Surat Undangan 4. Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kegiatan telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan

No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
4	Memaksimalkan pelaksanaan <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> kepada OPD binaan dalam rangka pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi.	1 Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Surat Undangan 4. Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kegiatan telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan
5	Memaksimalkan pelaksanaan <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> kepada OPD binaan dalam rangka pemenuhan dokumen SAKIP.	1 Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Surat Undangan 4. Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kegiatan telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan
6	Memaksimalkan pelaksanaan <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> kepada OPD binaan dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1 Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Surat Undangan 4. Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kegiatan telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan

Denpasar, 5 Januari 2025
 Inspektur Daerah Kota Denpasar



Ir. Putu Naring Diyaningsih, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650726 199201 2 001



Form 10

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar								
Tahun Penilaian		: 2025								
Tujuan Strategis		: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik								
Urusan Pemerintahan		: Unsur Pengawasan Pemerintahan								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Risiko Strategis Pemda									
1	Tuntutan Penguatan dan Peningkatan Kapabilitas APIP Pemerintah Kota Denpasar lebih optimal	RSP.25.35.04.01								
2	Tuntutan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang lebih efektif	RSP.25.35.04.02								
3	Tuntutan untuk mempertahankan Opini BPK (WTP) terhadap laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar	RSP.25.35.04.03								
4	Tuntutan Predikat Reformasi Birokrasi OPD di Pemerintah Kota Denpasar	RSP.25.35.04.04								
5	Pelaksanaan SAKIP di lingkup Pemerintah Kota Denpasar belum baik	RSP.25.35.04.05								

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
19	Benturan kepentingan dalam proses penetapan penyedia barang dan jasa	RF.25.35.04.09								
20	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.25.35.04.10								
21	Penipuan atas penyedia fiktif dalam pemilihan penyedia kegiatan	RF.25.35.04.20								

Denpasar, 27 Maret 2025
 Inspektur Daerah Kota Denpasar



Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650726 199201 2 001

